PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144
Telepon (024) 76008247 Faksimile (024) 7608202
Laman : http://www.jatengprov.go.id Pos-el : disperakim@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Yth.	:	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Dari	:	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tembusan	:	-
Tanggal	:	06 November 2025
Nomor	:	107/KEU/XI/2025
Sifat	:	Biasa
Lampiran	:	-
Hal	:	Permohonan Asmanan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 Bulan Oktober

Berikut kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 Bulan Oktober.

Bersama ini mohon dengan hormat asmanan Bapak untuk Laporan tersebut (terlampir).

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Nova Adiwidanto, S.Hut, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19731113 199803 1 003

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

BULAN OKTOBER

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 Bulan Oktober pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di bulan yang akan datang.

Demikian, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Oktober 2025

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Boedyo Dharmawan, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691012 199803 1 003

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2025 bulan Oktober sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Semarang, Oktober 2025

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Boedyo Dharmawan, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691012 199803 1003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan. Dimana informasi ini sangat bermanfaat bagi Pengguna Anggaran dalam menilai akuntanbilitas dalam membuat suatu keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun kebijaksanaan yang dapat ditetapkan dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai pendapatan Dinas dan belanja selama dalam satu periode.
2. Menyediakan informasi tentang Realisasi Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai.

Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan serta sitimatis dalam satu periode untuk kepentingan :

1. Akuntanbilitas

   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Manajemen

   Membantu pengguna anggaran dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset kewajiban dan ekuitas dana.
3. Transparan

   Memberikan informasi keuangan yang benar, jujur dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah yang dipercayakan kepada pengguna anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Akuntansi Elektronik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1 Ekonomi Makro

PENDAPATAN :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2025 tidak ada anggaran pendapatan.

BELANJA :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan Anggaran Belanja Murni sebesar Rp. 52.928.992.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 52.742.542.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 186.450.000,- dan menjadi Anggaran Belanja Pergeseran sebesar Rp. 49.121.484.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 48.940.484.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 181.000.000,- dan menjadi Anggaran Belanja Perubahan sebesar Rp. 47.185.007.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 46.798.007.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 387.000.000,- yang digunakan untuk kegiatan bersifat rutin dan pembangunan dengan jumlah kegiatan sebanyak 19 kegiatan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Tujuan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah **"Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Lestari"** dengan 4 (empat) sasaran yaitu :

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis
2. Perekonomian Tangguh yang Berdaya saing dan Berkelanjutan
3. SDM Berdaya Saing, Berkarakter dan Adaptif
4. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan DPA. Dalam mewujudkan Visi Gubernur pada periode perencanaan jangka menengah transisi 2024-2026 serta memantapkan eksistensi dan arah sasaran yang akan dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan program-program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan;
2. Program Kawasan Permukiman;

3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
4. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;
5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
6. Program Redistrubusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;
7. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam pencapaian arah sasaran yang telah ditetapkan maka pelaksanaan program-program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan ditunjang oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2025
periode 1 Januari s.d 31 Oktober 2025

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	**BELANJA DAERAH**	**47.185.007.000**	**36.412.851.122**	**77,17**	**10.772.155.878**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**46.798.007.000**	**36.328.351.122**	**77,63**	**10.469.655.878**
5.1.1	Belanja Pegawai	13.183.059.000	10.898.705.997	82,67	2.284.353.003
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.891.559.000	4.839.805.852	82,15	1.051.753.148
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.268.798.000	3.631.919.762	85,08	636.878.238
5.1.1.1.1.1	**Belanja Gaji Pokok PNS**	**3.613.583.000**	**3.114.219.240**	**86,18**	**499.363.760**
5.1.1.1.1.2	**Belanja Gaji Pokok PPPK**	**655.215.000**	**517.700.522**	**79,01**	**137.514.478**
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	375.500.000	310.275.042	82,63	65.224.958
5.1.1.1.2.1	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**	**340.000.000**	**285.942.346**	**84,10**	**54.057.654**
5.1.1.1.2.2	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**	**35.500.000**	**24.332.696**	**68,54**	**11.167.304**
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	187.880.000	155.100.000	82,55	32.780.000
5.1.1.1.3.1	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**	**187.880.000**	**155.100.000**	**82,55**	**32.780.000**
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	156.225.000	109.475.000	70,08	46.750.000
5.1.1.1.4.1	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**	**88.455.000**	**79.355.000**	**89,71**	**9.100.000**
5.1.1.1.4.2	**Belanja Tunjangan Fungsional PPPK**	**67.770.000**	**30.120.000**	**44,44**	**37.650.000**
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	103.300.000	76.700.000	74,25	26.600.000
5.1.1.1.5.1	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**	**90.350.000**	**76.700.000**	**84,89**	**13.650.000**
5.1.1.1.5.2	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK**	**12.950.000**	**0**	**0**	**12.950.000**
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	213.000.000	176.149.580	82,70	36.850.420
5.1.1.1.6.1	**Belanja Tunjangan Beras PNS**	**185.000.000**	**155.630.580**	**84,12**	**29.369.420**
5.1.1.1.6.2	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**	**28.000.000**	**20.519.000**	**73,28**	**7.481.000**
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	142.000.000	49.677.981	34,98	92.322.019
5.1.1.1.7.1	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**	**142.000.000**	**49.677.981**	**34,98**	**92.322.019**
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	120.000	51.925	43,27	68.075
5.1.1.1.8.1	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**	**100.000**	**45.364**	**45,36**	**54.636**
5.1.1.1.8.2	**Belanja Pembulatan Gaji PPPK**	**20.000**	**6.561**	**32,81**	**13.439**
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	372.500.000	301.572.877	80,96	70.927.123
5.1.1.1.9.1	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**	**338.500.000**	**278.241.414**	**82,20**	**60.258.586**
5.1.1.1.9.2	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK**	**34.000.000**	**23.331.463**	**68,62**	**10.668.537**
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.500.000	7.220.882	76,01	2.279.118
5.1.1.1.10.1	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**	**8.000.000**	**6.126.914**	**76,59**	**1.873.086**
5.1.1.1.10.2	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK**	**1.500.000**	**1.093.968**	**72,93**	**406.032**

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	27.000.000	21.662.803	80,23	5.337.197
5.1.1.1.11.1	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**	**22.500.000**	**18.381.027**	**81,69**	**4.118.973**
5.1.1.1.11.2	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK**	**4.500.000**	**3.281.776**	**72,93**	**1.218.224**
5.1.1.1.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	35.736.000	0	0	35.736.000
5.1.1.1.12.1	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS**	**28.342.000**	**0**	**0**	**28.342.000**
5.1.1.1.12.2	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK**	**7.394.000**	**0**	**0**	**7.394.000**
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.291.500.000	6.058.900.145	83,10	1.232.599.855
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.291.500.000	6.058.900.145	83,10	1.232.599.855
5.1.1.2.1.1	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**	**7.170.000.000**	**5.964.400.145**	**83,19**	**1.205.599.855**
5.1.1.2.1.2	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK**	**121.500.000**	**94.500.000**	**77,78**	**27.000.000**
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.789.948.000	12.527.600.126	79,34	3.262.347.874
5.1.2.1	Belanja Barang	2.701.040.000	1.651.321.007	61,14	1.049.718.993
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	2.701.040.000	1.651.321.007	61,14	1.049.718.993
5.1.2.1.1.4	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**	**265.000.000**	**221.175.000**	**83,46**	**43.825.000**
5.1.2.1.1.12	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**	**32.026.000**	**32.000.000**	**99,92**	**26.000**
5.1.2.1.1.24	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**	**135.479.000**	**109.773.540**	**81,03**	**25.705.460**
5.1.2.1.1.26	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**	**160.225.000**	**108.679.100**	**67,83**	**51.545.900**
5.1.2.1.1.27	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**	**16.700.000**	**14.746.000**	**88,30**	**1.954.000**
5.1.2.1.1.31	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**	**32.026.000**	**29.890.500**	**93,33**	**2.135.500**
5.1.2.1.1.35	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**	**6.013.000**	**6.013.000**	**100**	**0**
5.1.2.1.1.36	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**	**12.810.000**	**12.810.000**	**100**	**0**
5.1.2.1.1.40	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**	**1.226.100.000**	**451.906.867**	**36,86**	**774.193.133**
5.1.2.1.1.52	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**	**797.111.000**	**648.602.000**	**81,37**	**148.509.000**
5.1.2.1.1.53	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**	**17.550.000**	**15.725.000**	**89,60**	**1.825.000**
5.1.2.2	Belanja Jasa	10.064.090.000	8.536.223.360	84,82	1.527.866.640
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	5.699.676.000	4.549.243.441	79,82	1.150.432.559
5.1.2.2.1.3	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**	**435.387.000**	**310.724.000**	**71,37**	**124.663.000**
5.1.2.2.1.4	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**	**126.116.000**	**102.129.000**	**80,98**	**23.987.000**
5.1.2.2.1.6	**Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan**	**3.023.832.000**	**2.398.750.000**	**79,33**	**625.082.000**

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.2.1.16	**Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum**	**87.168.000**	**72.640.000**	**83,33**	**14.528.000**
5.1.2.2.1.24	**Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan**	**131.532.000**	**109.610.000**	**83,33**	**21.922.000**
5.1.2.2.1.25	**Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan**	**12.000.000**	**8.400.000**	**70**	**3.600.000**
5.1.2.2.1.28	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**	**107.650.000**	**91.524.300**	**85,02**	**16.125.700**
5.1.2.2.1.30	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**	**303.922.000**	**250.425.982**	**82,40**	**53.496.018**
5.1.2.2.1.31	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**	**612.000.000**	**518.196.600**	**84,67**	**93.803.400**
5.1.2.2.1.33	**Belanja Jasa Tenaga Supir**	**100.000.000**	**83.894.300**	**83,89**	**16.105.700**
5.1.2.2.1.55	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**	**11.932.000**	**8.930.000**	**74,84**	**3.002.000**
5.1.2.2.1.59	**Belanja Tagihan Telepon**	**46.000.000**	**37.951.103**	**82,50**	**8.048.897**
5.1.2.2.1.60	**Belanja Tagihan Air**	**16.000.000**	**13.815.678**	**86,35**	**2.184.322**
5.1.2.2.1.61	**Belanja Tagihan Listrik**	**341.057.000**	**273.326.478**	**80,14**	**67.730.522**
5.1.2.2.1.62	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**	**3.330.000**	**3.000.000**	**90,09**	**330.000**
5.1.2.2.1.67	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**	**24.350.000**	**19.826.000**	**81,42**	**4.524.000**
5.1.2.2.1.80	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**	**317.400.000**	**246.100.000**	**77,54**	**71.300.000**
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	303.299.000	272.085.579	89,71	31.213.421
5.1.2.2.2.5	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**	**133.259.000**	**106.186.054**	**79,68**	**27.072.946**
5.1.2.2.2.6	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**	**6.710.000**	**5.096.680**	**75,96**	**1.613.320**
5.1.2.2.2.7	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**	**8.330.000**	**6.391.952**	**76,73**	**1.938.048**
5.1.2.2.2.8	**Belanja Asuransi Barang Milik Daerah**	**155.000.000**	**154.410.893**	**99,62**	**589.107**
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	115.000.000	114.384.000	99,46	616.000
5.1.2.2.5.9	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**	**8.000.000**	**8.000.000**	**100**	**0**
5.1.2.2.5.25	**Belanja Sewa Bangunan Terbuka**	**107.000.000**	**106.384.000**	**99,42**	**616.000**
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	258.728.000	106.981.800	41,35	151.746.200
5.1.2.2.8.2	**Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural**	**133.728.000**	**106.981.800**	**80**	**26.746.200**
5.1.2.2.8.20	**Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi**	**125.000.000**	**0**	**0**	**125.000.000**
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.656.217.000	3.473.203.540	94,99	183.013.460
5.1.2.2.9.11	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei**	**2.999.886.000**	**2.999.876.480**	**100**	**9.520**
5.1.2.2.9.12	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik**	**452.136.000**	**434.132.960**	**96,02**	**18.003.040**
5.1.2.2.9.14	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus**	**204.195.000**	**39.194.100**	**19,19**	**165.000.900**

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	31.170.000	20.325.000	65,21	10.845.000
5.1.2.2.12.1	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**	**31.170.000**	**20.325.000**	**65,21**	**10.845.000**
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	570.258.000	497.559.132	87,25	72.698.868
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	340.633.000	283.113.132	83,11	57.519.868
5.1.2.3.2.22	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set**	**16.250.000**	**12.350.000**	**76**	**3.900.000**
5.1.2.3.2.36	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**	**226.100.000**	**180.626.132**	**79,89**	**45.473.868**
5.1.2.3.2.118	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel**	**12.810.000**	**12.810.000**	**100**	**0**
5.1.2.3.2.121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**	**28.055.000**	**26.419.000**	**94,17**	**1.636.000**
5.1.2.3.2.411	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya**	**57.418.000**	**50.908.000**	**88,66**	**6.510.000**
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	229.625.000	214.446.000	93,39	15.179.000
5.1.2.3.3.1	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**	**229.625.000**	**214.446.000**	**93,39**	**15.179.000**
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	2.354.960.000	1.818.496.627	77,22	536.463.373
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.354.960.000	1.818.496.627	77,22	536.463.373
5.1.2.4.1.1	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**	**2.354.960.000**	**1.818.496.627**	**77,22**	**536.463.373**
5.1.2.5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	99.600.000	24.000.000	24,10	75.600.000
5.1.2.5.2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	99.600.000	24.000.000	24,10	75.600.000
5.1.2.5.2.1	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**	**99.600.000**	**24.000.000**	**24,10**	**75.600.000**
5.1.5	Belanja Hibah	225.000.000	112.044.999	49,80	112.955.001
5.1.5.5	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	225.000.000	112.044.999	49,80	112.955.001
5.1.5.5.3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	225.000.000	112.044.999	49,80	112.955.001
5.1.5.5.3.2	**Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**	**225.000.000**	**112.044.999**	**49,80**	**112.955.001**
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	17.600.000.000	12.790.000.000	72,67	4.810.000.000
5.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	17.600.000.000	12.790.000.000	72,67	4.810.000.000
5.1.6.1.2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	17.600.000.000	12.790.000.000	72,67	4.810.000.000
5.1.6.1.2.1	**Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu**	**17.600.000.000**	**12.790.000.000**	**72,67**	**4.810.000.000**

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.2	**BELANJA MODAL**	**387.000.000**	**84.500.000**	**21,83**	**302.500.000**
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	222.000.000	84.500.000	38,06	137.500.000
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	87.500.000	0	0	87.500.000
5.2.2.5.1	Belanja Modal Alat Kantor	15.000.000	0	0	15.000.000
5.2.2.5.1.5	**Belanja Modal Alat Kantor Lainnya**	**15.000.000**	**0**	**0**	**15.000.000**
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	72.500.000	0	0	72.500.000
5.2.2.5.2.4	**Belanja Modal Alat Pendingin**	**72.500.000**	**0**	**0**	**72.500.000**
5.2.2.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	50.000.000	0	0	50.000.000
5.2.2.6.1	Belanja Modal Alat Studio	50.000.000	0	0	50.000.000
5.2.2.6.1.1	**Belanja Modal Peralatan Studio Audio**	**50.000.000**	**0**	**0**	**50.000.000**
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	84.500.000	84.500.000	100	0
5.2.2.10.1	Belanja Modal Komputer Unit	84.500.000	84.500.000	100	0
5.2.2.10.1.3	**Belanja Modal Komputer Unit Lainnya**	**84.500.000**	**84.500.000**	**100**	**0**
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	165.000.000	0	0	165.000.000
5.2.6.1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	165.000.000	0	0	165.000.000
5.2.6.1.1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	165.000.000	0	0	165.000.000
5.2.6.1.1.5	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software**	**165.000.000**	**0**	**0**	**165.000.000**
	Jumlah Belanja	**47.185.007.000**	**36.412.851.122**	**77,17**	**10.772.155.878**
	Surplus/(Defisit)	**0**	**(36.412.851.122)**	**100**	**36.412.851.122**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**0**	**(36.412.851.122)**	**100**	**36.412.851.122**

Semarang, 31 Oktober 2025

PPK - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(NOVA ADIWIDANTO, S.Hut,MSi)

NIP. 19731113 199803 1 003

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangana SKPD

PENDAPATAN :

Sumber Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak Ada.

BELANJA :

Anggaran Belanja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 52.928.992.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 52.742.542.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial. serta Belanja Modal sebesar Rp. 186.450.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Anggaran Belanja Pergeseran di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 49.121.484.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 48.940.484.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 181.000.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Anggaran Belanja Perubahan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 47.185.007.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 46.798.007.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 387.000.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Operasi :

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dengan Anggaran sebesar Rp. 13.183.059.000,- dan realisasi sebesar Rp. 10.898.705.997,- dengan Presentasi 82.67 %. Belanja Barang dan Jasa dengan Anggaran sebesar Rp. 15.789.948.000,- dan realisasi sebesar Rp. 12.527.600.126,- dengan Presentasi 79.34 %. Belanja Hibah dengan Anggaran sebesar Rp. 225.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 112.044.999,- dengan Presentasi 49.80 %. Belanja Bantuan Sosial dengan Anggaran sebesar Rp. 17.600.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 12.790.000.000,- dengan Presentasi 72.67 %.

Belanja Modal :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam Belanja Modal menganggarkan sebesar Rp. 387.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 84.500.000,- dengan Presentasi 21.83 % yang terbagi dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Anggaran sebesar Rp. 222.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 84.500.000, dengan Presentasi 38.06 %; Belanja Modal Aset Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 165.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 0,- dengan Presentasi 0%.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan atau Kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Kegiatan guna mencapai Kinerja yang telah ditetapkan, dengan adanya kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah. Dalam menghadapi kebijaksanaan tersebut, strategis yang diambil / dilaksanakan dengan mengevaluasi kembali target – target Pencapaian Kegiatan dan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait baik Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah guna mengantisipasi adanya kebijaksanaan yang berdampak pada Pencapaian Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

TAHUN ANGGARAN 2025

SKPD : **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Fungsi :

Sub Fungsi :

Provinsi : Jawa Tengah

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH	**47.185.007.000**	**35.923.105.438**	**10.619.090.562**	**76,13**
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**	**18.601.937.000**	**15.021.415.353**	**3.580.521.647**	**80,75**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**886.683.000**	**539.488.598**	**347.194.402**	**60,84**
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	582.312.000	311.851.730	270.460.270,00	53,55
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	304.371.000	227.636.868	76.734.132,00	74,79
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**13.646.863.000**	**11.262.569.817**	**2.384.293.183**	**82,53**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	13.183.059.000	10.898.705.997	2.284.353.003,00	82,67
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	418.354.000	330.109.920	88.244.080,00	78,91
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.336.000	17.184.500	8.151.500,00	67,83
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.486.000	3.486.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunanan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	13.302.000	9.867.500	3.434.500,00	74,18
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.326.000	3.215.900	110.100,00	96,69
	Kegiatan Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**167.513.000**	**165.892.193**	**1.620.807**	**99,03**
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.510.000	5.273.300	236.700,00	95,70
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	155.000.000	154.410.893	589.107,00	99,62
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.823.000	3.028.000	795.000,00	79,20
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	3.180.000	3.180.000	-	100,00
	Kegiatan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**67.132.000**	**49.768.500**	**17.363.500**	**74,1352857**
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.015.000	8.849.000	1.166.000,00	88,36
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11.271.000	8.274.000	2.997.000,00	73,41
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	37.170.000	23.969.500	13.200.500,00	64,49
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	726.000	726.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.950.000	7.950.000	-	100,00
	Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah	**1.247.119.000**	**932.848.412**	**314.270.588**	**74,80**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	32.026.000	29.890.500	2.135.500,00	93,33
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.315.000	18.315.000	10.000.000,00	64,68
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.810.000	12.810.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	265.000.000	221.175.000	43.825.000,00	83,46
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.534.000	11.534.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.330.000	3.000.000	330.000,00	90,09
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.550.000	15.725.000	1.825.000,00	89,60
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	560.543.000	327.774.200	232.768.800,00	58,47
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	19.335.000	16.916.000	2.419.000,00	87,49
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	296.676.000	275.708.712	20.967.288,00	92,93
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**222.000.000**	**84.500.000**	**137.500.000**	**38,06**
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	222.000.000	84.500.000	137.500.000,00	38,06
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.770.019.000**	**1.468.962.701**	**301.056.299**	**82,99**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	147.962.000	123.074.810	24.887.190,00	83,18
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	403.057.000	325.093.259	77.963.741,00	80,66
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.219.000.000	1.020.794.632	198.205.368,00	83,74
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**594.608.000**	**517.385.132**	**77.222.868**	**87,01**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	31.285.132	18.714.868,00	62,57
	Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.450.000	169.167.000	31.283.000,00	84,39
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	12.810.000	12.810.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.418.000	50.908.000	6.510.000,00	88,66
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	273.930.000	253.215.000	20.715.000,00	92,44

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
II.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**24.128.017.000**	**18.483.134.567**	**5.644.882.433**	**76,60**
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**158.803.000**	**138.418.820**	**20.384.180**	**87,16**
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Program Provinsi	101.473.000	92.782.160	8.690.840,00	91,44
	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	57.330.000	45.636.660	11.693.340,00	79,60
	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**59.141.000**	**48.366.408**	**10.774.592**	**81,78**
	Sub Kegiatan Sosialisasi Standart Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukarekawan Tanggap Bencana	32.840.000	26.919.784	5.920.216,00	81,97
	Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayan Perumahan	26.301.000	21.446.624	4.854.376,00	81,54
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**18.865.287.000**	**13.789.588.763**	**5.075.698.237**	**73,10**
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	3.125.589.000	2.098.738.730	1.026.850.270,00	67,15
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	15.739.698.000	11.690.850.033	4.048.847.967,00	74,28
	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	**5.044.786.000**	**4.506.760.576**	**538.025.424**	**89,34**
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	5.044.786.000	4.506.760.576	538.025.424,00	89,34
III.	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**2.307.800.000**	**1.377.352.459**	**930.447.541**	**59,68**
	Kegiataan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**46.951.000**	**42.262.100**	**4.688.900**	**90,01**
	Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	46.951.000	42.262.100	4.688.900,00	90,01
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**2.260.849.000**	**1.335.090.359**	**925.758.641**	**59,05**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	523.257.000	513.642.032	9.614.968,00	98,16
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	49.416.000	44.378.896	5.037.104,00	89,81
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	1.688.176.000	777.069.431	911.106.569,00	46,03
IV.	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**398.605.000**	**225.718.959**	**172.886.041**	**56,63**
	Kegiatan Urusan Penyelenggaran PSU Permukiman	**398.605.000**	**225.718.959**	**172.886.041**	**56,63**
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	343.376.000	180.935.379	162.440.621,00	52,69
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	55.229.000	44.783.580	10.445.420,00	81,09
V.	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**246.991.000**	**190.454.000**	**56.537.000**	**77,11**
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	**246.991.000**	**190.454.000**	**56.537.000**	**77,11**
	Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultansi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	246.991.000	190.454.000	56.537.000,00	77,11
VI.	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**411.546.000**	**245.214.500**	**166.331.500**	**59,58**
	Kegiatan Penyelesaian Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**411.546.000**	**245.214.500**	**166.331.500**	**59,58**
	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	303.342.000	181.489.500	121.852.500,00	59,83
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	108.204.000	63.725.000	44.479.000,00	58,89
VII.	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**330.853.000**	**278.270.200**	**52.582.800**	**84,11**
	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintah Daerah Kabupataen/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**330.853.000**	**278.270.200**	**52.582.800**	**84,11**
	Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten / Kota	38.928.000	38.928.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah	291.925.000	239.342.200	52.582.800,00	81,99

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
VIII.	**PROGRAM PENIGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**116.447.000**	**101.545.400**	**14.901.600**	**87,20**
	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Ulitilas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	**116.447.000**	**101.545.400**	**14.901.600**	**87,20**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkonisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dan Kialifikasi Menengah	116.447.000	101.545.400	14.901.600,00	87,20
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**642.811.000**	**489.745.684**	**153.065.316**	**76,19**
	Kegiataan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	**642.811.000**	**489.745.684**	**153.065.316**	**76,19**
	Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	162.515.000	120.987.960	41.527.040,00	74,45
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	480.296.000	368.757.724	111.538.276,00	76,78
JUMLAH		**47.185.007.000**	**36.412.851.122**	**10.772.155.878**	**77,17**